

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andriyani, Anissa. *Tingkat Penerapan Budaya Hukum*, Sinar Ilmu, Surabaya. 2002.
- Arif, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Cyber Crime di Indonesia*, Edisi 1-2, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007.
- Budhijanto, Dadrivanto. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi, Regulasi dan Konvergensi*, Refika Aditama. Bandung. 2010.
- Djaja, Ermansjah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Kajian Yuridis UURI No. 31 Tahun 1999 juncto UURI No. 20 Tahun 2001 Versi UURI No. 30 Tahun 2002 juncto UURI No. 46 Tahun 2009)*. Edisi Kedua. Cet. 1. Sinar Grafika. Jakarta. 2010.
- Febrian, Jack. *Pengetahuan Komputer dan Teknologi Informasi*, Cetakan I, Informatika. Bandung. 2004.
- Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian, Pidana dan Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2006.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Ed. II. Sinar Grafika. Jakarta. 2000.
- \_\_\_\_\_, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Ed. II. Cet. V. Sinar Grafika. Jakarta. 2003.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 1985.
- \_\_\_\_\_, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 1986.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana*. Edisi Revisi. Cet. 1. Sinar Grafika. Jakarta. 2001.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan I, Sinar Grafika. Jakarta. 2005.

- \_\_\_\_\_, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Cetakan I, Yasrif Watampone. Jakarta. 2005.
- Kuffal. H.M.A. *Penerapan KUHP Dalam Praktek Hukum*, Edisi Kedelapan (Revisi) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM Press). Malang. 2005.
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*, Edisi I, Cetetakan I, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003.
- , *Tindak Pidana Terkait Dengan Komputer dan Internet : Suatu Kajian Materil dan Formil, Makalah Disajikan pada Seminar Pembuktian dan Penanganan Cyber Crime di Indonesia*, Fakultas Hukum UI. Jakarta. 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan I, Liberty. Yogyakarta. 1977.
- Mangkuprodjo, Sumantri. *Substansi Hukum, Definisi dan Imlementasi*, Rineka Cipta. Jakarta. 2003.
- Mohammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Cetakan I, PT. Citra Bakti. Bandung. 2007.
- Mulyadi Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana. Perspektif, Teoritis dan Praktek*. PT. Alumni Bandung. Bandung. 2008.
- Nasution, A. Karim. *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jilid II, Kejaksaan Agung RI. Jakarta. (tanpa tahun)
- Nur Dewata, Mukti Fajar. Dan Achmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2010.
- Prints, Darwan. *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, Cetakan II, Djambatan. Jakarta. 1988.
- Poernomo, Bambang. *Pokok – Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Liberty. Jodjakarta. 2001.
- Subekti. *Hukum Pembuktian*, Prandnya Paramita. Jakarta. 1995
- Soesilo, R. *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea. Bogor. 1995.

Sasangka, Hari. dan Rosita, Lily, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Cetakan I, Mandar Maju. Bandung. 2003.

Soerodibroto, R. Soenarto. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Edisi 5, Cetakan 9, PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2003.

Sanusi, M. Arsyad. *Hukum dan Teknologi Informasi*, Tim Kemasbuku. Jakarta. 2005.

### **Peraturan Perundang – Undangan**

*Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Brosur. Penyuluhan/Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Semarang. 2002.

*Undang – Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi*. Gramedia, Jakarta. 2006.

*Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Brosur. Penyuluhan/Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Semarang. 2002.

*Undang – Undang Republik Indonesia nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Edisi kedua Cet. 1. Sinar Grafika. Jakarta. 2010.

*Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*. Gramedia. Jakarta. 2003.

*Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Gramedia. Jakarta. 2005.

*Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Gramedia. Jakarta. 2008.

*Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.* Fokusmedia. Bandung. 2011.

*Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya.* Cet. 1. Redaksi Indonesia Tera. Yogyakarta. 2008.

*Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.* Mahkamah Agung. Jakarta. 2009.

*Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.*

### **Internet**

Alat Bukti Elektronik (*rekaman*) Dalam Pembuktian Pidana, ([www.endradharmalaksana.com](http://www.endradharmalaksana.com)). Di akses pada tanggal 10 Oktober 2011.

Analisis Pembuktian Elektronik, ([elib.unicom.ac.id](http://elib.unicom.ac.id)). Di akses pada tanggal 20 Februari 2012.

Edi Pramana. *Legalitas Keterangan Saksi Secara Telecomprence Dalam Pembuktian Perkara Pidana.* *Pramana-Recht.Blogspot.com/2012/01/legalitas-keterangan-saksi-secara.html*. Di akses pada tanggal 10 Maret 2012.

Hukum Online.Com. *Saksi Tak Hadir di Persidangan Tak Langgar KUHAP.*

[http://hukumonline.com/berita/baca/lt4cb47c75egcl8/saksi-tak-hadir-di-persidangan-tak-langgar KUHAP](http://hukumonline.com/berita/baca/lt4cb47c75egcl8/saksi-tak-hadir-di-persidangan-tak-langgar-KUHAP). Di akses pada tanggal 10 Maret 2012.

Koran Tempo. *Telecomprence Bisa Menjadi Yurisprudensi.* Alvalaible From: URL:

<http://www.arsip.net/id/link.php?lh=Bg4ABQRRRA1YB>. Di akses pada tanggal 10 Maret 2012.

Ningsih Sri Hari, *Keabsahan Transaksi Elektronik dan Aspek Hukum Pembuktian Terhadap Data Elektronik di Indonesia,* ([bloggue-hadi.blogspot.com](http://bloggue-hadi.blogspot.com)). Di akses pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2011.

Pembuktian Perkara Pidana Setelah Berlakunya UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ([www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)). Di akses pada tanggal 20 Februari 2012.

Pembuktian Data Elektronik Dalam Pengadilan, (<http://rudini76ban.wordpress.com/>). Di akses pada tanggal 20 Februari 2012.

Pudiastuti Citra Adi. *Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana.* FH-UI. Jakarta. 2005.

([www.digilib.ui.co.id](http://www.digilib.ui.co.id)). Di akses pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2011.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Nomor :
	07/Pid.B/TPK/2008/PN.JKT.PST.	
Putusan	Pengadilan Jakarta Selatan	Nomor :
	354/Pid/B/2002/PN.JAKSEL.	
Putusan	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	Nomor :
	86/Pid.Sus/2011/PN.JKT.UT.	
Putusan	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Nomor :
	1528/Pid.Sus/2011/PN.JKT.BAR.	
Putusan	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	Nomor :
	335/PID.B/2009/JKT.TIM.	